Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI 1

BAB I : PENDAHULUAN 7
A. Latar Belakang 7
B. Tujuan 10
C. Metode Penyusunan Cetak Biru 10
D. Materi Dan Sistematika Cetak Biru 13

BAB II : VISI-MISI DAN NILAI-NILAI 15
A. Pengertian 15
B. Rekomendasi 16

BAB III : SIFAT DAN KEDUDUKAN 35
A. Normatif 35
B. Permasalahan 36
C. Rekomendasi 37
D. Indikator 38

BAB IV : FUNGSI DAN KEWENANGAN 39

A. Kewenangan Komisi Yudisial Bersumber Dari Konstitusi 39
1. Normatif 39

2. Permasalahan 43
3. Rekomendasi 47
4. Indikator 51

B. Kewenangan Komisi Yudisial Bersumber Dari Undang-Undang 51
1. Pemberian Penghargaan Hakim 52
1.1. Normatif 52
1.2. Permasalahan 53
1.3. Rekomendasi 54
1.4. Indikator 54

2. Menghadiri Persidangan 55
2.1. Normatif 55
2.2. Permasalahan 56
2.3. Rekomendasi 56
2.4. Indikator 57

3. Analisis Putusan Inkracht Sebagai Dasar Pertimbangan Mutasi Hakim 57
3.1. Normatif 57
3.2. Permasalahan 58
3.3. Rekomendasi 59
3.4. Indikator 59

4. Seleksi Pengangkatan Hakim 60
4.1.Normatif 60
4.2. Permasalahan 60
4.3. Rekomendasi 61
4.4. Indikator 62

C. Kemungkinan Kewenangan Lain 63
BAB V : PELAKSANAAN KEWENANGAN UTAMA 64

A. Seleksi Hakim Agung 64

1. Pengusulan Calon Hakim Agung 64
1.1. Normatif 64
1.2. Permasalahan 65
1.3. Rekomendasi 66
1.4. Indikator 67

2. Tahapan Seleksi 68
2.1. Normatif 68
2.2. Permasalahan 75
2.3. Rekomendasi 77
2.4. Indikator 78

3. Pengajuan Calon Hakim Agung ke DPR 79
3.1. Normatif 79
3.2. Permasalahan 79
3.3. Rekomendasi 80
3.4. Indikator 80

B. Pengawasan Hakim 80

1. Proses Penerimaan Laporan/ Pengaduan 80
1.1. Normatif 80
1.2. Permasalahan 85
1.3. Rekomendasi 86

1.4. Indikator 88

2. Data Hasil Pengawasan 88

3. Prosedur Pemberhentian Hakim 92
3.1. Normatif 92
3.2. Permasalahan 94
3.3. Rekomendasi 95
3.4. Indikator 96

BAB VI : STRUKTUR ORGANISASI 97

A. Normatif 97
B. Permasalahan 100
C. Rekomendasi 102
D. Indikator 105

BAB VII : SUMBER DAYA MANUSIA 106

A. Normatif 106
B. Permasalahan 107
C. Rekomendasi 109
D. Indikator 113

BAB VIII : SISTEM KEUANGAN DAN SARANA 114

A. Normatif 114

1. Anggaran dan Realisasi 115
2. Audit Pelaksanaan Anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI 117

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 118

B. Permasalahan dan Rekomendasi 120

1. Perencanaan Anggaran 120
2. Pelaksanaan Anggaran 125
3. Pengawasan Anggaran 129
4. Pengelolaan Anggaran dan Dinamika KY 131
5. Menuju Kemandirian Pengelolaan Anggaran KY 133
6. Sarana dan Prasarana 134

C. Indikator 136

BAB IX : KERJASAMA LEMBAGA 137

A. Normatif 137

1. Latar Belakang Jejaring 138
2. Manfaat Jejaring 141
3. Ruang Lingkup Jejaring 142
4. Program Jejaring 144
5. Kerjasama dengan Komisi Negara 146
6. Pembentukan Posko Pemantauan Peradilan 147
7. Kerjasama Internasional 150

B. Permasalahan 153

1. Besarnya Lingkup Kewenangan KY 153
2. Defenisi dan Prasyarat Jejaring 155
3. Defenisi dan Prasyarat Jejaring KY 160

4. Pengembangan dan Pengelolaan Jejaring KY 112
5. Program Jejaring 165
6. Komunikasi Publik 166
7. Kerjasama Internasional 168

C. Rekomendasi 169

1. Jejaring KY 169
2. Kerjasama Internasional 174

D. Indikator 175

BAB X : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS 176

A. Normatif 176
B. Permasalahan 181
C. Rekomendasi 182
D. Indikator 182

BAB XI : MENGELOLA PERUBAHAN 184

A. Urgensi Perubahan 184
B. Aktor Perubahan 185
C. Program Prioritas 186

TABEL TAHAPAN KERJA 189

DAFTAR TIM PENYUSUN CETAK BIRU KOMISI YUDISIAL 198